

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis dan ekonomi telah mengalami transformasi yang luar biasa di era globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya integrasi ekonomi antar negara, yang menghasilkan peluang untuk pertumbuhan bisnis, akses ke pasar global, dan kemajuan teknologi yang pesat. Globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi dan memperluas jangkauan perdagangan internasional, di samping itu, fenomena ini turut memberikan peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, termasuk kecurangan dalam dunia bisnis (Harahap et al., 2024). Dalam konteks ini, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen utama untuk memberi informasi mengenai keuangan yang ada di perusahaan dan merupakan alat komunikasi bisnis yang penting dalam dunia bisnis.

Laporan keuangan berperan krusial dalam menilai kinerja perusahaan, perkembangan yang berkelanjutan, dan kemajuan dalam mencapai tujuannya (Dharma et al., 2023). Laporan ini menyajikan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup posisi keuangan, arus kas, dan hasil operasi dalam suatu periode tertentu. Penyajian laporan keuangan yang tepat dan terbuka sangat krusial untuk mempertahankan pihak-pihak berkepentingan, seperti penanam modal, pemberi pinjaman, otoritas pemerintah, dan publik (Ulya et al., 2024).

Bagi perusahaan, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan merencanakan strategi bisnis ke depan, sehingga memiliki nilai strategis dalam pengambilan keputusan operasional dan finansial. Keuangan memiliki posisi yang strategis dalam dunia bisnis karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang memengaruhi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal (D. A. Putri, 2020). Mengakui pentingnya informasi keuangan yang akurat, setiap pihak yang terlibat dalam bisnis harus memastikan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, tindakan *fraud* dalam laporan keuangan tidak hanya menodai reputasi perusahaan, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian dan stabilitas pasar. Kerugian moneter dan non-moneter dapat diakibatkan oleh kecurangan, seperti memburuknya reputasi organisasi, kerugian keuangan, menurunnya kepercayaan pemegang saham, dan dampak buruk lainnya (Christian & Veronica, 2022).

Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, baik regulator, auditor, maupun manajemen perusahaan, untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif dan transparan guna mencegah terjadinya *fraud*. Kecurangan didefinisikan sebagai perilaku melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi atau organisasi serta memberikan dampak kerugian bagi pihak lainnya (Kusumoaji & Aris, 2023). *Fraud* atau kecurangan ialah aksi yang dilakukan untuk mencapai keinginan individu atau kelompok dengan cara melanggar hukum sehingga merugikan pihak lain.

Fraud atau kecurangan menjadi musuh utama dalam dunia bisnis dan menjadi sorotan utama dalam akuntansi forensik. *Fraud* atau tindakan penipuan, menjadi

semakin kompleks dan sulit terdeteksi seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan globalisasi pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi dan kemajuan teknologi telah memperluas ruang lingkup operasi bisnis, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan. Sebuah organisasi ahli anti-penipuan yang memiliki cabang di seluruh dunia, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* berkantor pusat di Amerika Serikat., termasuk Indonesia, telah merilis *Report to The Nations (RTTN)* tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, ACFE mengungkapkan bahwa kerugian akibat *fraud* memiliki nilai median sebesar USD 145.000 per kasus, dengan rata-rata total kerugian tahunan mencapai 5% dari pendapatan Perusahaan (Priantara, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa *fraud* bukan hanya masalah biasa, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan kesehatan *financial* perusahaan.

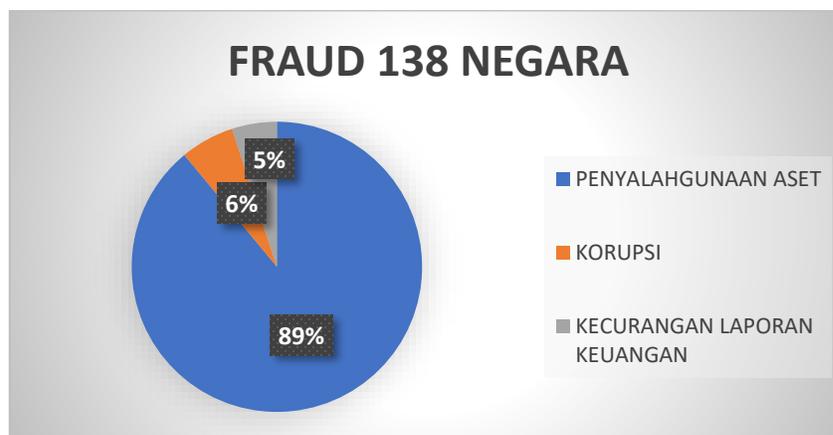
ACFE membedakan tiga jenis kecurangan: korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan (Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat, 2024). Korupsi adalah jenis *fraud* yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan oleh seseorang di dalam organisasi guna menguntungkan diri sendiri atau untuk menguntungkan pihak lain dengan cara tidak sah. Korupsi sering kali melibatkan kolusi antara karyawan perusahaan dan pihak luar untuk mengelabui perusahaan atau pihak eksternal. Jenis *fraud* kedua adalah *Asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset. *Fraud* ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan oleh individu yang berwenang dalam mengelola aset tersebut. Contoh dari penyalahgunaan aset

termasuk penggelapan uang tunai, pencurian barang atau inventaris, pemalsuan cek, dan penggunaan aset perusahaan untuk keperluan pribadi.

Jenis *fraud* yang terakhir adalah kecurangan dalam laporan keuangan atau yang biasa dikenal sebagai kecurangan laporan keuangan. Kecurangan keuangan (*fraud*) ialah suatu permasalahan yang sering ditemui dalam dunia bisnis dan telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia (Abdillah et al., 2023). Manipulasi informasi keuangan adalah suatu perbuatan penipuan yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi guna mendapatkan untung, dan memberikan dampak tidak baik untuk pengguna laporan keuangan (Iskandar et al., 2022). Kecurangan dalam laporan keuangan biasanya dilaksanakan guna memengaruhi persepsi para pengguna laporan keuangan, sehingga mereka membuat keputusan akuntansi atau bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Biasanya, pihak yang memperoleh keuntungan dari manipulasi tersebut adalah pelaku kecurangan itu sendiri. (Preicilia et al., 2022).

Laporan terbaru ACFE yang berjudul “*Occupational Fraud 2024: A Report to Nations*” mengidentifikasi faktor-faktor dan dampak buruk dari penipuan di tempat kerja. Laporan terbaru ini menganalisis penipuan yang diselidiki antara Januari 2022 dan September 2023, pasca-COVID. Laporan tersebut mencakup 1.921 kasus dari 138 negara yang mengakibatkan kerugian lebih dari \$3,1 miliar. Pemeriksa penipuan bersertifikat (CFE) memperkirakan bahwa organisasi kehilangan 5% pendapatan akibat penipuan setiap tahunnya dengan kerugian rata-rata per kasus sebesar \$1,7 juta (Ploskonka, 2024).

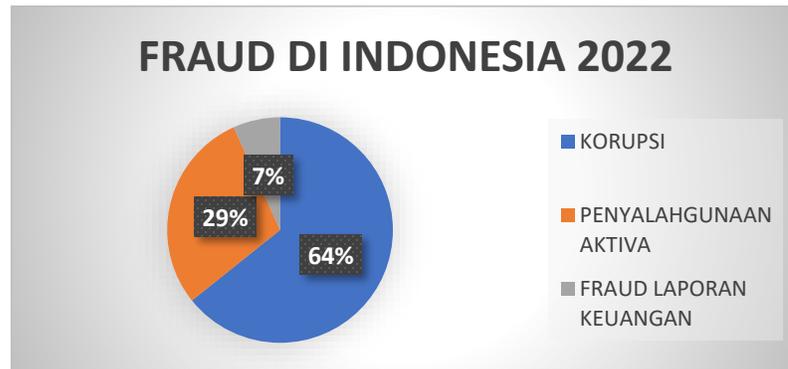
Dari banyaknya kasus *fraud*, kasus penyalahgunaan aset yang mencuri atau penyalahgunaan sumber daya organisasi, merupakan kasus yang paling banyak dengan 89% kasus, dengan nilai \$120.000 per kejadian. Untuk kasus korupsi merugikan hingga rerata sejumlah \$200.000 per kejadian. Berdasarkan *report* yang di tulis oleh Ploskonka (2024), hanya 5% kasus yang melibatkan penipuan laporan keuangan tetapi juga termasuk kerugian yang paling mahal dengan kerugian rata-rata sebesar \$766.000 per kasus, hampir meningkat 30% dibandingkan dengan laporan terakhir ACFE pada tahun 2022. Meskipun ketiga kategori ini diidentifikasi, 38% kasus melibatkan lebih dari satu jenis penipuan ini dengan tumpang tindih yang paling umum terjadi pada penyalahgunaan aset dan korupsi.



Gambar 1. 1 Data *Fraud* di Dunia Menurut ACFE
Sumber : (Ploskonka, 2024)

Menurut laporan yang diterbitkan oleh (ACFE), Indonesia berada di peringkat keempat di Asia Pasifik dalam hal jumlah *fraud* (kecurangan/korupsi) pada tahun 2022. Sebanyak dua puluh tiga kasus *fraud* dilaporkan terjadi di Indonesia pada tahun 2022.

Tiga kecurangan terbesar di Indonesia adalah manipulasi informasi keuangan (6,7%), korupsi (64%), dan eksploitasi aset negara dan perusahaan (28,9%).



Gambar 1. 2 Data *Fraud* di Indonesia
Sumber : (HS, 2023)

Penipuan laporan keuangan berdampak kerugian bagi berbagai pihak, karena penyajian dalam laporan keuangan tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Manipulasi informasi keuangan bisa terjadi dari berbagai sektor, salah satunya sektor konstruksi. Dalam gelar konstruksi Kementerian PUPR pada tahun 2024, Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum, 2024). Dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun. Besarnya anggaran ini harus diimbangi dengan kesiapan industri konstruksi. Badan Pusat Statistik juga mengungkapkan

mengenai kontribusi sektor konstruksi, yang dimana dalam perekonomian Indonesia sektor konstruksi menyumbang sebesar 9,65% untuk PDB Indonesia pada Triwulan II tahun 2024 (Khoirifa, 2024).

Industri konstruksi, yang berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia, menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko penyimpangan dalam laporan keuangan. Persaingan ketat serta ekspektasi dari pemangku kepentingan kerap mendorong perusahaan untuk melaporkan terkait finansial organisasi secara tidak benar berdasarkan fakta sesungguhnya. Aksi tersebut tidak sekedar membawa efek negatif terhadap citra perusahaan yang terlibat, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap sektor konstruksi secara keseluruhan.

Salah satu kasus dari manipulasi informasi keuangan pada sektor konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Tbk. Pada bulan Juni 2023, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian_BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Deputy Menteri BUMN I, mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh Wijaya Karya (WIKA). Dalam berita Warta Ekonomi yang ditulis oleh Yohanna Valerie Immanuella, sejumlah perusahaan BUMN, terutama Wijaya Karya, menyajikan kondisi keuangan yang tidak akurat, dengan mengklaim laba yang seolah-olah positif, padahal arus kas perusahaan tidak pernah benar-benar positif (Immanuella, 2023). Dalam rapat direksi WIKA, para pemimpin perusahaan lebih banyak membahas perkembangan proyek konstruksi dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan. Aspek seperti arus kas, piutang, dan keuntungan proyek jarang dibahas, sehingga meskipun banyak proyek selesai, sebagian besar justru merugi. Kartika menekankan

pentingnya kewaspadaan terhadap bias yang mungkin mengalihkan perhatian dari aspek profitabilitas yang seharusnya menjadi fokus.

Contoh lain dari manipulasi laporan keuangan adalah PT. WaskitaKarya Tbk (WSKT), yang laporan keuangannya untuk tahun 2018-2021 ditemukan telah dipalsukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nuari menuliskan dalam berita Kompasiana bahwa PT. Waskita Karya Tbk (WSKT) melakukan pencatatan pendapatan palsu, pengakuan biaya yang ditunda, pengakuan aset yang dipercepat, praktik akuntansi yang tidak sesuai ini digunakan untuk menyembunyikan situasi keuangan yang sebenarnya (Nuari, 2024). Dalam kasus proyek palsu perusahaan ini, para eksekutif perusahaan menciptakan inisiatif palsu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Negara dirugikan sebesar Rp 202 miliar. Kasus tersebut diinisiasi oleh oknum petinggi perusahaan tersebut yang mengakibatkan perusahaan merugi hingga sekitar Rp. 202 Miliar, meskipun kerugian yang dipulihkan masih 34%. Lima mantan pegawai perusahaan tersebut terbukti menandatangani 41 kontrak kerja palsu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 202,296 miliar. Mereka dijatuhi hukuman 4-7 tahun penjara.

Pada April 2023, NKE Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk melaporkan kerugian bersih sebesar Rp 5,22 miliar untuk Triwulan I 2023. Namun, pada Mei 2023, perusahaan merevisi laporan tersebut, menunjukkan laba bersih sebesar Rp 5,12 miliar, yang berarti perubahan dari rugi menjadi laba. Perubahan ini disebabkan oleh kenaikan nilai persediaan sejumlah Rp 5,4 M dan kenaikan uang muka sebesar Rp 4,9 M. Beberapa pemegang saham mencurigai adanya manipulasi dalam revisi laporan

keuangan ini dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam berita Info Bank News yang ditulis oleh Argisa Putri Khorifah mengatakan bahwa revisi laporan keuangan Triwulan I 2023, terdapat dugaan bahwa NKE menanggung beban biaya ke periode berjalan (Argisa Putri Khorifah, 2023). Hal ini menyebabkan perusahaan tampak seolah-olah memperoleh laba, padahal sebenarnya merugi. Praktik semacam ini melanggar Prinsip Akuntansi *Matching Cost Against Revenue* yang tercantum dalam PSAK 14 dan 72.

Penipuan yang melibatkan laporan keuangan merugikan banyak orang, baik di dalam maupun di luar organisasi. Laporan keuangan adalah produk akhir dari prosedur akuntansi yang berfungsi sebagai saluran komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui operasi perusahaan atau informasi keuangan (Ahmadi, 2020). Dengan tidak disajikan laporan keuangan dengan yang sebenarnya, maka dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kesalahan pencatatan atau manipulasi dalam laporan keuangan dapat terjadi karena adanya motivasi dan tekanan dari berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, baik dari internal maupun eksternal (Chang & Budiman, 2023).

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan adalah strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Strategi bisnis meliputi sejumlah komitmen dan langkah yang terencana serta terpadu, yang disusun untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan meraih keunggulan bersaing dengan memaksimalkan keahlian inti dalam segmen pasar tertentu (Suriyanti &

Binangkit, 2019). Dengan mengimplementasikan strategi yang disesuaikan dengan tantangan yang sedang dihadapi, perusahaan atau organisasi dapat menghadapi tantangan dan meningkatkan ketahanan mereka dalam lingkungan yang selalu berubah (Irwan et al., 2024). Strategi bisnis juga dapat menentukan bagaimana suatu perusahaan mengelola risiko, mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan kebijakan akuntansi dalam operasionalnya. pada efisiensi dan stabilitas keuangan, yang mungkin berpengaruh berbeda pada kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi manipulasi informasi keuangan, sebab tuntutan untuk meraih sasaran keuangan, mempertahankan daya saing, dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan mampu menstimulasi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dalam rangka mencerminkan performa yang lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Dalam penelitian ini, strategi bisnis diukur menggunakan tiga proksi utama, yaitu transaksi pihak berelasi, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *capital intensity*. Transaksi pihak berelasi dapat mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan entitas lain yang memiliki kepentingan bersama, yang dalam beberapa kasus dapat dimanfaatkan untuk manipulasi keuangan. Transaksi pihak berelasi ialah segala bentuk pemindahan aset, kewajiban, atau penyediaan jasa yang dilakukan antara suatu entitas pelapor dengan pihak lain yang memiliki hubungan keterkaitan dengannya. (Nahumury & Agus Irwandi, 2024). Berdasarkan paragraf 9 PSAK 7, pihak terkait adalah individu atau badan yang

memiliki hubungan langsung dengan penyusun laporan keuangan, yang disebut sebagai "entitas pelapor."(Suartama, 2022). Transaksi penjualan dengan pihak yang memiliki relasi dengan perusahaan memiliki potensi terjadinya risiko salah saji material karena rentan terhadap manipulasi yang dapat dilakukan oleh manajemen. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang dapat memicu konflik, di mana manajer mungkin melakukan kecurangan dengan mengalihkan aset pemegang saham untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat merugikan perusahaan secara finansial (Daresta & Suryani, 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip etis (Uyun et al., 2024). Tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan atau *CSR* diatur dalam “Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)”. Pasal tersebut mengatur bahwa badan usaha yang beroperasi di sektor atau memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Nadirah, 2020). Perusahaan dengan tingkat *CSR* yang tinggi cenderung lebih transparan dan memiliki tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan. Namun, dalam beberapa kasus, *CSR* juga bisa digunakan sebagai alat untuk menutupi praktik tidak etis atau sebagai strategi untuk meningkatkan citra perusahaan tanpa adanya implementasi nyata (Sumiyati et al., 2023).

Capital intensity merujuk pada kegiatan pendanaan yang dijalankan perusahaan secara berkelanjutan, khususnya dalam bentuk investasi pada aset tetap atau

penggunaan modal secara intensif (Yunie, 2022). Dalam konteks strategi bisnis, *capital intensity* dapat berperan sebagai aspek yang memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *fraud*, dimana semakin besar tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka kecenderungan terjadinya *fraud* turut meningkat (Putra et al., 2025).

Berdasar pada latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, menjadikan peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Bisnis Dalam Memprediksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub – Sektor Konstruksi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab sejumlah pertanyaan berikut:

1. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Melakukan analisis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Melakukan analisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
3. Melakukan analisis pengaruh *capital intensity* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sub-sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharap memberikan kebermanfaatan dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan dalam literatur akuntansi forensik terkait aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
- b) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait strategi bisnis dan kecurangan laporan keuangan, khususnya dalam konteks industri konstruksi.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab guna meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan.
- b) Memberikan masukan bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai risiko keuangan suatu perusahaan berdasarkan strategi bisnis yang diterapkan.
- c) Menjadi referensi bagi regulator dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan di sektor konstruksi.

3. Manfaat Akademis

- a) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti hubungan antara strategi bisnis dan kecurangan laporan keuangan di sektor lain atau dengan variabel yang berbeda.
- b) Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai mitigasi kecurangan dalam laporan keuangan dengan pendekatan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan etis.